



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : M.HH-69.AH.11.01 TAHUN 2008
TENTANG

PENGESAHAN STRUKTUR DAN PERSONALIA
DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA
MASA BAKTI 2007 - 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Penegak Demokrasi Indonesia Nomor 078/DPP/PPDI/EX/VIII/2008, tanggal 1 Agustus 2008, perihal Permohonan SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas Kepengurusan DPP PPDI Hasil MUNAS Luar Biasa di Kupang, Nusa Tenggara Timur, sesuai Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
- Menimbang : 1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 756/Pdt.G/2008/PN Jkt.Sel mengabulkan Gugatan Penggugat DPP Partai Penegak Demokrasi Indonesia yang amar putusannya antara lain:
- Menghukum Tergugat untuk memberikan keputusan terdaftar atau surat keputusan terdaftar kepada pengurus baru Penggugat dan mengesahkan kepengurusan DPP PPDI hasil .MUNASLUB Partai Penegak Demokrasi Indonesia Nomor 09/KPTS/MUNASLUB/PPDI/XI/2007 Tanggal 17 November 2007 tentang struktur dan personalia DPP PPDI masa bakti 2007 - 2012;
 - Menyatakan sah tindakan Tergugat yang telah mengembalikan status hukum Partai Penegak Demokrasi Indonesia sebagai partai politik yang mandiri yang tidak tergabung dengan partai politik lainnya dan mendaftarkannya;
 - Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun Tergugat melakukan perlawanan, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada angka 1, perlu mengesahkan kepengurusan DPP PPDI masa bakti 2007 - 2012 sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 756/Pdt.G/2008/PN Jkt.Sel

8

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005;
 3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.09-PR.07.10 Tahun 2007 tanggal 20 April 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia .

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA :
- KEDUA :
- KETIGA :
- Mengesahkan Struktur dan Personalia Partai Penegak Demokrasi Indonesia masa bakti 2007 - 2012 sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 756/Pdt.G/2008/PN Jkt.Sel;
- Struktur kepengurusan tingkat pusat partai politik tersebut sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Agustus 2008

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA



ANDI-MATTALATTA



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Nomor : M.HH-69.AH.11.01 TAHUN 2008

Tanggal : 7 Agustus 2008

STRUKTUR DAN PERSONALIA DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA
MASA BHAKTI 2007 - 2011

- | | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| 1. Ketua Umum | : Drs. H. Endung Sutrisno, MBA, MM |
| 2. Wakil Ketua Umum | : Drs. Simon Hayon |
| 3. Ketua | : H. Anjar Asmara |
| 4. Ketua | : Sri Hartati Wulandari |
| 5. Ketua | : Nico Leonardo |
| 6. Ketua | : Birman Sitompul, SH |
| 7. Ketua | : Salmiyaningsih |
| 8. Sekretaris Jenderal | : Drs. V. Joes Prananto |
| 9. Wakil Sekretaris Jenderal | : Ir. Hj. Endang Sulistyorini |
| 10. Wakil Sekretaris Jenderal | : Drs. Edison Lekatompessy, MM |
| 11. Wakil Sekretaris Jenderal | : Ir. Siprianus Sabon Nama |
| 12. Bendahara | : Hendra Justian, MLA |
| 13. Wakil Bendahara | : Ir. Hj. Mega Parwati, MM |

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA



ANDI MATTALATTA